

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu sumber daya di bidang kesehatan yang membutuhkan pengamanan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pengamanan ini diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.<sup>(1)</sup>

Sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan acuan bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan di daerah. Salah satu subsistem dalam SKN adalah subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Tujuan penyelenggaraan subsistem tersebut adalah supaya tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu. Selain itu, subsistem alat kesehatan juga menjamin aspek persediaan dan pemerataan alat kesehatan di institusi kesehatan. Salah satu institusi kesehatan yang harus meenjamin

ketersediaan dan keamanan alat kesehatan adalah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).<sup>(2)</sup>

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Salah satu aspek pendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas adalah peralatan kesehatan. Ketersediaan alat kesehatan sangat penting untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal termasuk di puskesmas, sehingga perlu dilaksanakan manajemen logistik alat kesehatan di puskesmas agar alat kesehatan tetap dapat tersedia dalam kualitas dan jumlah yang cukup, sesuai dengan perkembangan teknologi dan pemenuhan standar sesuai dengan klasifikasi.<sup>(3)</sup>

Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan material atau alat-alat, dan pengendalian. Manajemen logistik di puskesmas memiliki persyaratan umum salah satunya adalah tersedia tenaga yang mampu mengoperasikan alat kesehatan. Selain tenaga, puskesmas juga harus memiliki prosedur operasional sebagai tolak ukur pelaksanaan logistik dan juga sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan alat kesehatan, transportasi penyaluran dan suku cadang pemeliharaan.<sup>(4)</sup>

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu aturan mengenai pengelolaan barang atau semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang

milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.<sup>(5)</sup>

Kota Sawahlunto memiliki 6 puskesmas yang terdiri dari 2 puskesmas rawatan yakni Puskesmas Talawi dan Puskesmas Silungkang, serta 4 puskesmas non rawatan yakni Puskesmas Lunto, Puskesmas Kampung Teleng, Puskesmas Kolok, dan Puskesmas Sungai Durian. Apabila dibandingkan dengan puskesmas rawatan lainnya, Puskesmas Talawi merupakan puskesmas yang lebih banyak mengajukan pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan Puskesmas Talawi telah melakukan penambahan ruangan yakni UGD bersalin, sehingga Puskesmas Talawi mengajukan pengadaan alat kesehatan untuk ruangan tersebut. Penambahan alat-alat kesehatan tersebut terdiri dari 1 unit *Examination table*, 1 unit *baby examination table*, 4 unit tempat tidur pasien, 1 unit *folded/hi-lo stretcher*, 2 buah lampu sorot, 3 unit sterilisator, 6 unit tensimeter, 2 buah kursi roda, 3 unit meja gynekologi, 6 stetoscope, 8 buah alat ukur panjang bayi, dan 1 buah timbanga digital.

Berdasarkan survei dan telaah dokumen, yang dilakukan oleh peneliti dengan penanggungjawab peralatan dan inventaris barang, bahwa keadaan alat kesehatan di Puskesmas Talawi yaitu sebanyak 234 keadaan baik, 233 keadaan kurang baik, dan 19 dalam keadaan rusak berat. Dilihat dari data tersebut sebanyak 47,94% dari alat kesehatan dalam keadaan kurang baik. Peralatan yang kurang baik itu diantaranya

adalah stetoscope, tempat tidur pasien, dental chair, cooling unit, kulkas, dan beberapa alat kedokteran bedah lainnya. Alat kesehatan di Puskesmas Talawi belum pernah dikalibrasi oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan dan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam penanganan pasien seperti kesalahan diagnosa oleh keadaan alat yang kurang baik.

Yuliningsih (2001) dalam penelitiannya dengan judul analisa sistem pengelolaan perbekalan obat atau alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menggambarkan bahwa ketersediaan obat atau alat kesehatan persediaan ruangan tergantung pada sistem pengelolaan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur manajemen yaitu kebijakan pelayanan, organisasi, SDM, sarana/prasarana, metode dan sistem informasi, serta aspek logistik yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan atau pengendalian.<sup>(6)</sup> Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto tahun 2016.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto tahun 2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Evaluasi pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto tahun 2016 melalui pembenahan sistem.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran masukan (*input*) pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi yang meliputi: Ketersediaan tenaga (*Man*), ketersediaan uang (*Money*), sarana dan prasarana (*Material*) dan metode (*Method*).
2. Mengetahui gambaran proses (*process*) pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi yang meliputi: fungsi perencanaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.
3. Mengetahui gambaran keluaran (*output*) penggunaan alat kesehatan yang efektif dan efisien dalam proses pelayanan di Puskesmas Talawi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan ke dalam suatu penelitian.

2. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas Talawi dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan manajemen logistik alat kesehatan.

3. Bagi Institusi Pendidikan



Sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan tentang fungsi-fungsi logistik alat kesehatan di puskesmas yang dilihat dari aspek yang berbeda.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian evaluasi pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan melalui pendekatan sistem yang dilihat dari komponen input (tenaga, dana, sarana dan prasarana, metode), komponen proses (fungsi perencanaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian) dan komponen output di Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto.

